



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PP 39**  
**TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2021**  
INSPEKTORAT JENDERAL

**Kementerian  
Perindustrian**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kami munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmat kesehatan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2021 telah selesai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Januari 2022

**INSPEKTUR JENDERAL**

**MASROKHAN**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal .....	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program .....	1
I.3. Struktur Organisasi .....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	8
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal .....	8
B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal .....	10
C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021.....	19
D. Rencana Aksi.....	22
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN .....	37
III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran.....	37
III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal .....	41
III.3. Hambatan dan kendala.....	56
III.4. Langkah Tindak Lanjut.....	56
BAB IV. PENUTUP.....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal.....	10
Tabel 2 Tabel Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	11
Tabel 3 Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal (Revisi) Tahun 2021 .....	14
Tabel 4 Program & Kegiatan Inspektorat Jenderal .....	19
Tabel 5 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal TW IV Tahun 2021 .....	22
Tabel 6 Rekap Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.....	37
Tabel 7 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Berdasarkan data SPAN 30 Desember 2021 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal .....	2
Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I.....	4
Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II.....	5
Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III.....	6
Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV .....	7

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

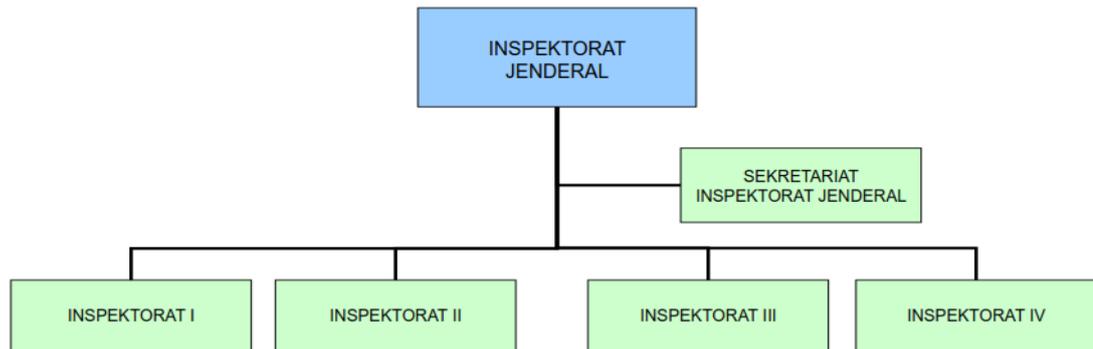
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

### I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal**

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

## **2) Inspektorat I**

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari dua unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI). Tata organisasi Inspektorat I meliputi:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

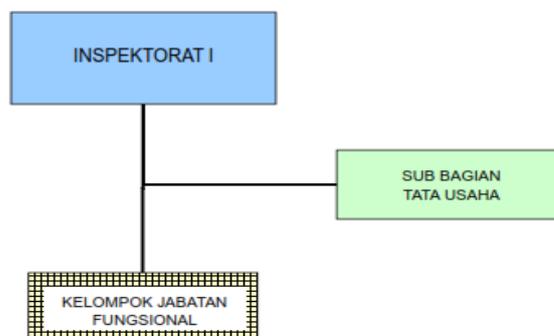
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 orang;
- b) Auditor Madya: 1 orang;
- c) Auditor Muda: 6 orang;
- d) Auditor Pratama: 7 orang.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I**

### 3) Inspektorat II

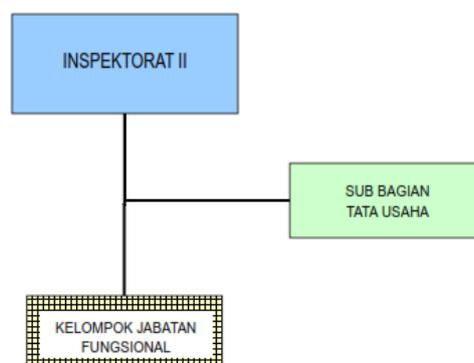
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
  - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
  - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang Inspektur;
- b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Auditor: 14 orang;
- d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



**Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II**

#### 4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

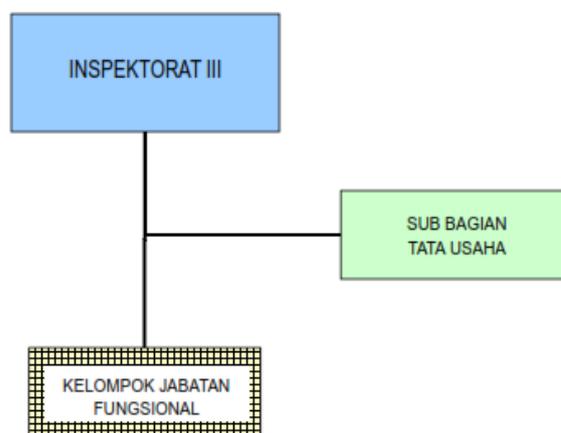
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



**Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III**

## 5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

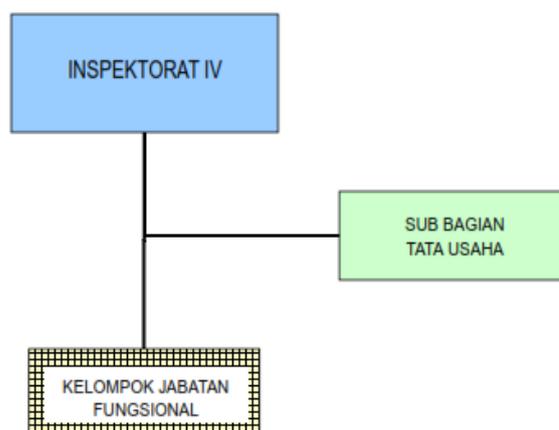
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



**Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV**

## BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

### II.1 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

#### 1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

#### 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

### **3. Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal**

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	71%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3

## **B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal**

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang telah disahkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang cara pengukurannya dapat diketahui melalui tabel berikut:

**Tabel 2 Tabel Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
<b>PERSPEKIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus: Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				instansi tersebut.
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
		3.3 Penerapan TABK	77%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL *)
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	4.1 Sistem informasi pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor	25%	Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor
		4.2 Penyesuaian pedoman/ prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%	Jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat
		4.3 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		4.4 Tingkat Perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%	Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk
		4.5 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki
		4.6 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil <i>self assessment</i>
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	5.1 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan
		5.2 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal
		5.3 Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik Auditor	92%	Dihitung dengan adanya aduan terkait pelanggaran kode etik auditor
		5.4 Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran

Pada bulan November 2021, terdapat arahan dari Biro Perencanaan mengenai Renstra Kementerian Perindustrian revisi terbaru, yaitu adanya penambahan 1 indikator kinerja utama dan 3 indikator kinerja dari Renstra Kementerian Perindustrian dan perlu dicascading hingga Eselon II. Adapun Revisi Renstra Inspektorat Jenderal terbaru, menjadi:

**Tabel 3 Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal (Revisi) Tahun 2021**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
<b>PERSPEKIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus: Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB dikali 100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Baik	2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
		3.3 Penerapan TABK	77%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. cara ukur: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	75%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal ( $R_{P3DN}$ )= $\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ Keterangan: $RA_{P3DN}$ = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) $TotA_{P3DN}$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi  SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya  Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan</p> <p>Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat</p>
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	<p>Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal</p>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		7.2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki
		7.3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		7.4 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil <i>self assessment</i>
		7.5 Nilai Pelaporan Keuangan IKPA	74	Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. nilai pelaporan keuangan ini memuat:Gaji dan tunjangan rutin bulanan
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah);

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				e. 60 ke bawah (sangat rendah).
		8.2 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan
		8.3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal

### C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 4 Program & Kegiatan Inspektorat Jenderal**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I</li> <li>- Evaluasi Kegiatan Inspektorat I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Laporan</li> <li>- 121 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> </ul>
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Laporan</li> <li>- 13 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
		- Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	- 5 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III</li> <li>- Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat III</li> <li>- Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III</li> <li>- Evaluasi Kegiatan Inspektorat III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Laporan</li> <li>- 109 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>-5 Laporan</li> </ul>
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>- Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>- Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV</li> <li>- Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Laporan</li> <li>-17 Laporan</li> <li>-1 laporan</li> <li>-1 laporan</li> <li>-5 Laporan</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Perkantoran</li> <li>- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</li> <li>- Layanan Sarana Internal</li> <li>- Layanan Pengawasan Internal</li> <li>- Layanan Monitoring &amp; Evaluasi Internal</li> <li>- Bantuan Produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Layanan</li> <li>- 1 Layanan</li> <li>-1 unit</li> <li>-2 laporan</li> <li>-13 Laporan</li> <li>-200 Paket</li> </ul>

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2021 dianggarkan dengan pagu total per Desember 2021 sebesar Rp 33,186,374,000.

## D. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi berdasarkan Renstra terbaru Inspektorat Jenderal. pada triwulan IV, sebagai berikut:

**Tabel 5 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal TW IV Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1. Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan (Binwas Bogor, Binwas Jakarta, Binwas Yogyakarta, Binwas Surabaya-Kendal)</li> <li>• Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>• Koordinasi Konsultasi dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP (Penilaian SAKIP Setjen dan BPSDMI)</li> <li>• Pelaksanaan Pelaporan Keuangan/BMN</li> <li>• Koordinasi Pelaporan Keuangan dan BMN</li> <li>• Reviu RKAKL Setjen dan BSDMI</li> </ul> <b>IR II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian SAKIP Eselon II ILMATE, IKMA, BPIPI</li> <li>• Penilaian SAKIP Eselon I</li> </ul>	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan telah sesuai rencana Triwulan IV</li> </ul> <b>IR II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dilakukan Reviu LKBMN pada Ditjen IKMA, ILMATE, dan BPIPI;</li> <li>✓ Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>✓ Masih berlangsungnya kegiatan Audit Tematik pada Ditjen IKMA</li> </ul> <b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penilaian Monev SAKIP Eselon I pada BPPI dan Itjen</li> <li>✓ Audit Internal program pengawasan dan peningkatan</li> </ul>	IR I, IR II, IR III, IR IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Dana Dekonsentrasi</li> <li>• Evaluasi Hibah BMN</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan Layanan Operasional Pimpinan</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas layanan rumah tangga dan perlengkapan satuan kerja</li> <li>• Koordinasi Penyusunan Program BPPI</li> <li>• Pendampingan Pelaksanaan Audit Eksternal oleh BPK untuk LK 2020</li> <li>• Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal</li> <li>• Evaluasi SAKIP Es I / Audit Balai Besar dan Baristand &amp; Konsultasi</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaxan Pemeriksaan Internal dan Eksternal serta Penguatan Pengawasan di Lingkungan BPPI</li> </ul>	<p>akuntabilitas aparatur Kemenperin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan Reviu RKAKL terkait penghematan tunkin pada satker cakupan tugas Ir III</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro</li> <li>✓ Penyelesaian Hibah BMN Ditjen IKFT</li> <li>✓ Reviu revisi anggaran Ditjen IKFT</li> </ul> <p><b>Set Itjen:</b></p> <p>a. Verifikasi</p> <p>Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (verifikasi tahap awal Subbagian PTLHP);</p> <p>b. Koordinasi dengan</p>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Konsinyering Pengelolaan PNBPN di lingkungan BPPI</li> <li>• Pelaksanaan Konsinyering Pengelolaan PNBPN</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit P3DN</li> <li>• Audit Kinerja IKFT, P3DN, IA, KPAIL</li> <li>• Cek Fisik IKFT, P3DN, IA, KPAIL.</li> </ul> <p><b>Set Itjen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan Pendampingan / pengawalan kegiatan berisiko tinggi</li> </ul>	<p>Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilakukan secara rutin.</p> <p>Telah diperoleh hasil Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2020: Rp 1,975,729,108,365 Temuan BPK: Rp 653,625,627.60, maka batas toleransi temuan yang diperoleh 0.33%</p>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri</li> <li>• Audit STTT Bandung, SMTI Pontianak, AKA Bogor, SMAK Bogor, STMI Jakarta, SMTI Lampung, BDI Jakarta, APP Jakarta, ATK Yogyakarta, SMTI Yogyakarta, BDI Yogyakarta, Akom Solo, BDI Surabaya, Politeknik Kendal, BDI Denpasar</li> </ul> <p><b>IR II &amp; IV: -</b></p> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2020 dan Semester I 2021</li> </ul> <p><b>Set Itjen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Kinerja , Audit Khusus, Reviu RKAKL</li> </ul>	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada PTKI Medan</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada BDI Medan</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada SMK-SMTI Padang</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada BDI Padang</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada BDI Denpasar</li> </ul> <p>IR II: Kegiatan Audit Tematik pada Ditjen IKMA masih berlangsung</p> <p>Set Itjen: Hingga 30 Desember 2021, total rekomendasi: 610, tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti (data dapat berubah, karena masih dalam proses pelaksanaan)</p>	IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
	3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	<b>IR I, II, III,IV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit khusus</li> <li>• Peningkatan peran pengawasan lainnya</li> <li>• Pembinaan dan koordinasi pengelolaan BMN pada satker cakupan tugas</li> </ul> <b>Set Itjen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan aspek kepegawaian dan hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>• Koordinasi pelaksanaan klinik konsultasi pengawasan</li> <li>• Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan konsultasi hukum</li> </ul>	<b>IR I II, III, IV, &amp; Set Itjen:</b> ✓ Sampai dengan akhir Desember, belum ada pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.	<b>I</b> <b>R I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen</b>
	4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91.5%	<b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi Perencanaan Kerja dan Anggaran BPPI;               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Revisi Anggaran</li> <li>• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>• Penyusunan Rencana PNBP dan Peraturan Tarif PNBP</li> <li>• Bimtek dan sosialisasi bidang penganggaran</li> <li>• Pembinaan satker vertikal</li> </ul> </li> </ul>	<b>IR II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Telah dilakukan pemantauan tindaklanjut pada Ditjen ILMATE, BPPI, Sidoarjo, dan Dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bali dan</li> </ul>	<b>IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen</b>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Akhir</li> <li>○ Persiapan &amp; pelaksanaan Bimtek</li> <li>○ Penyusunan Laporan</li> <li>○ Pelaksanaan Kegiatan pelayanan Operasional Perkantoran</li> <li>○ Pelaksanaan penyusunan Renstra BSKJI</li> <li>○ Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan data &amp; informasi, kehumasan, dan pelayanan publik</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Evaluasi SAKIP Es II</li> <li>○ Pendampingan SAKIP Es I</li> </ul> <p><b>Set Itjen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut</li> <li>○ Perbaikan realisasi capaian kinerja berdasarkan surat teguran yang telah di layangkan pada 22 April 2021 terkait capaian indikator kinerja</li> </ul>	Provinsi Riau  <b>Set Itjen:</b>  Berdasarkan hasil evaluasi TW III lalu, metode pengukuran indikator ini menggunakan hasil (t-1) agar pencapaian indikator ini menjadi lebih baik, selain itu, satker memiliki lebih banyak waktu dalam penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan diharapkan akan lebih optimal.			
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1.	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Koordinasi PMPRB</li> <li>• Penilaian Mandiri Pembangunan Zona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Mandiri PMPRB, telah dilaksanakan Panel I-III</li> </ul>	<b>Set Itjen</b>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
yang baik			Integritas	<p>penilaian mandiri PMPRB telah dilaksanakan di TW II.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil PMPRB telah diperoleh indikator kinerja telah tercapai, Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB <math>(5.61/6.25)*100%=89.76\%</math></li> <li>• Kegiatan Penilaian PMPZI Tahun 2021 sampai dengan rapat pleno hasil PMPZI. Hasil rapat pleno mengusulkan 31 satker (14 diusulkan WBBM dan 17 diusulkan WBK).</li> <li>• Kegiatan Penyusunan Berita Acara dan Laporan kegiatan penilaian ZI tahun 2021 masih dalam proses penyusunan.</li> <li>• Survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan Zona Integritas.</li> </ul>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
	2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian maturitas SPIP telah dilaksanakan pada bulan September 2021, secara Agregat Kementerian Perindustrian.</li> <li>• Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2020-2021 Nomor B/738/SJ-IND/KU/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Diperoleh hasil bahwa nilai MRI Kementerian Perindustrian sebesar 2,620.</li> </ul>	IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>					

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan sarana dan perlengkapan perkantoran</li> </ul> <p><b>Set Itjen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monev pelaksanaan kegiatan Itjen</li> <li>Evaluasi dan pembinaan kegiatan di luar negeri</li> <li>Pelaksanaan penelaahan sejawat</li> </ul>	<p>IR I, IR II, IR III, IR IV: Pelaksanaan pengawasan telah sesuai standar seperti reuiu, audit, kegiatan consulting</p> <p>Setitjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dilaksanakan penyebaran survey online mengenai Kepuasan Pelanggan Itjen pada bulan Desember 2021, Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden (auditi), diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 87,5% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B</li> </ul>	<b>IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen</b>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
	2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Reviu LAKIP Itjen dan Setitjen</li> <li>• Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3</li> <li>• Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem manajemen mutu ISO dan SOP-AP</li> <li>• Penilaian SAKIP Eselon II &amp; Eselon I</li> <li>• Pra Evaluasi Sakip Itjen</li> <li>• Peningkatan kerjasama SDM Pegawai Itjen JPT dan JFU</li> <li>• Peningkatan pengembangan kompetensi pegawai Itjen</li> <li>• Penerbitan Majalah Solusi</li> <li>• Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja</li> <li>• Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Pelaporan Hasil Pengawasan</li> <li>• Penyusunan dan Revisi RKAKL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Semua kegiatan pendukung telah dilaksanakan.</li> <li>✓ Berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, kapabilitas APIP Kemenperin telah mencapai Level 3 dengan catatan.</li> </ul>	Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan			
		3.	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	Koordinasi Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi	IR II: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Audit Tematik Ditjen IKMA masih dalam proses</li> </ul> Setitjen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebagai pendukung kegiatan audit rutin dilaksanakan.</li> </ul>	Ir I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	1.	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	- Pengadaan Barang dan Jasa produk dalam negeri di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Ir I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang		Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	72%	Penghitungan efektivitas regulasi di lingkungan Inspektorat Jenderal	Penerapan regulasi yang dijadikan sampel di lingkungan Inspektorat Jenderal	Ir I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78	Penilaian SAKIP telah dilaksanakan pada Triwulan II Pemantauan dan penilaian kinerja periode Juli-Desember 2021 akan dilaksanakan	Pemantauan dan penilaian kinerja periode Juli-Desember 2021 telah dilaksanakan Pelaporan capaian kinerja TW IV Penyusunan LAKIP 2021	Inspektorat Jenderal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>					
7. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	IR I: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT</li> </ul> IR II: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran</li> <li>○ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas</li> </ul> IR III: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran</li> <li>○ Peningkatan Hubungan Antar Lembaga/Instansi/satker terkait</li> </ul> IR IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyelesaian Hibah BMN</li> </ul> Setitjen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi Program Pengawasan</li> <li>○ Bimbingan dan Pengawasan Aspek Program di Lingkungan Kemenperin</li> </ul>	Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	Ir I, II, III, dan IV Set Itjen (Bagian KHO)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
	2. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan Perannya	90%	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai 100%	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)
	3. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyebaran Kuesioner Pelayanan Sekretariat Inspektorat Jenderal kepada lingkungan Inspektorat Jenderal secara internal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor;</li> <li>- Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk;</li> </ul> Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran.	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	4. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Penilaian SAKIP Eselon I</li> <li>o Koordinasi Analisis &amp; Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan</li> <li>o Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait Isu-isu aktual bidang industri</li> </ul>	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen telah mencapai target, yaitu 91% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,02/36,3 = 0,91 * 100\% = 91$	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Hukum dan Organisasi)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
	5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan;</li> <li>o Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.</li> </ul>	- Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bagian Keuangan)
8. Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bagian Kepegawaian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN IV		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 100%	Realisasi Kegiatan	
	2. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelatihan di kantor sendiri (PKS) atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan</li> </ul>	PKS yang telah dilaksanakan adalah 4 Pelatihan (Januari-September), diklat substansi yg telah diikutsertakan 7. Maka Capaian hingga Desember 2021: $7/11 * 100\% = 64\%$	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian )
	3. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Koordinasi Pengembangan SDM</li> <li>o Pedoman dan kenaikan pangkat, diklat-diklat</li> <li>o Keikutsertaan diklat pengembangan SDM Itjen</li> <li>o Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA</li> <li>o Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Itjen</li> <li>o Koordinasi Pembinaan Kepegawaian</li> </ul>	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan TW IV, Hingga Desember 2021, terdapat 81 orang pegawai yang mendapatkan diklat kompetensi dari total 104 APIP. $81/104 * 100\% = 77.88\%$	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian )

### BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

#### III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak sepuluh (10) kali. Pagu awal sebesar Rp 40.643.630.000. Revisi pertama dan kedua dilakukan pada triwulan I dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal penghematan belanja Kementerian/Lembaga. Dengan adanya penghematan sekitar Rp 2,312,373,000 yang berasal dari tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13, maka total pagu Inspektorat Jenderal berubah menjadi Rp 37,331,257,000. Kemudian ada revisi ke-4 pada tanggal 18 Agustus 2021 menjadi Rp 34,788,232,000. Kemudian pada tanggal 15 September 2021 terdapat revisi DIPA ke-5, maka pagu anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp 32,332,974,000. Revisi ke-6 dilaksanakan pada 8 Oktober 2021, menjadi Rp 33,282,974,000. Revisi ke-7 dilaksanakan pada 5 November 2021 dengan tidak merubah nominal pagu anggaran. Revisi ke-8 dilaksanakan pada 24 November 2021, Revisi ke-9 dilakukan pada 7 Desember 2021, menjadi Rp 33,186,374,000. Dan terakhir revisi ke-10 dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021, menjadi Rp 33,186,374,000. Berikut daftar rekap revisi anggaran Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV:

**Tabel 6 Rekap Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV**

Revisi Ke-	Tanggal	DS - DIPA	Nilai (Rp)	Dasar	Revisi
6	8 Okt 2021	0536-5801-1390-9150	33.282.974.000	Pemenuhan Keutuhan Anggaran Antigen Pegawai ITJEN dan kegiatan Pengawasan oleh Pimpinan	DIPA
7	5 Nov 2021	7048-1493-3744-7629	33.282.974.000	Revisi Perbaikan Akun COVID-19 di ITJEN beserta perbaikan halaman III DIPA	DIPA

Revisi Ke-	Tanggal	DS - DIPA	Nilai (Rp)	Dasar	Revisi
8	24 Nov 2021	3310-7012-2170-6970	33.282.974.000	Revisi terkait ketidaksesuaian penggunaan Akun COVID-19 yang sebelumnya telah direalisasikan	DIPA
9	7 Des 2021	3008-0977-5591-7510	33.186.374.000	Revisi Pengalihan Dana Berlebih kepada BPSDMI Untuk Kegiatan Sherpa G20	DIPA
10	23 Des 2021	3008-0977-5591-7510	33.186.374.000	Revisi Pemutakhiran POK Optimalisasi Sisa Anggaran ITJEN Tahun 2021	Pemutakhiran POK

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan IV ini telah terlaksana dengan cukup baik. Komposisi pegawai yang *work from office* (WFO) sudah mencapai 75% seiring membaiknya penanganan kasus Covid-19 di Indonesia hingga akhir bulan Desember 2021.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian hingga Triwulan IV Tahun 2021 (Januari - Desember) mencapai Rp 32,997,358,394,- 99.43 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,186,374,000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW IV tahun 2021 :

**Tabel 5 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2021**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan IV		Realisasi s.d. Triwulan IV		Sisa Anggaran s.d. Triwulan IV	
		Keuangan (Rp.)	%	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1,605,000,000	411,182,065	32.68	1,604,304,151	99.96	695,849	22.02
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	1,505,000,000	542,794,932	44.76	1,499,290,381	99.62	5,709,619	33.11
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	1,505,000,000	542,951,826	43.63	1,493,273,789	99.22	11,726,211	33.54
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1,505,000,000	534,736,349	44.44	1,502,044,005	99.80	2,955,995	32.36
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	27,066,374,000	8,841,272,194	38.15	26,898,446,068	99.38	167,927,932	31.89
<b>TOTAL</b>	<b>33,186,374,000</b>	<b>10,872,937,366</b>	<b>38.02</b>	<b>32,997,358,394</b>	<b>99.43</b>	<b>189,015,606</b>	<b>31.57</b>

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

**Tabel 7 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Berdasarkan data SPAN 30 Desember 2021**

No	Kode   Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Dana Tersedia
1	51   Belanja Pegawai	15,242,091,000	15,202,503,756	99.74	39,587,244
2	52   Belanja Barang	17,299,846,000	17,150,505,658	99.13	149,340,342
3	53   Belanja Modal	644,437,000	644,348,980	99.98	88,020
<b>Jumlah</b>		<b>33,186,374,000</b>	<b>32,997,358,394</b>	<b>99.43</b>	<b>189,015,606</b>
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto (data SPAN per 30 Desember 2021)</i>					

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran perjenis belanja telah hampir 100% telah terealisasi.

Kegiatan terkait pelaksanaan penyusunan anggaran pada Triwulan IV ini meliputi:

- 1) Penyusunan Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal Tahun 2022 telah 100% selesai.
- 2) Penyusunan konsep dokumen untuk penganggaran Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tahun 2022 berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor B/1441/SJ-IND.1/PR/XI/2021 terkait permohonan data dukung pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan TIK pada RKA-K/L Tahun Anggaran 2022;
- 3) Penyiapan rancangan awal rencana kerja Kementerian Perindustrian berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor B/102/SJ-IND/PR/XII/2021 terkait persiapan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 pada unit kerja masing-masing dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan industri baik di tingkat nasional maupun Kementerian.

### **III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal**

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang didukung sepenuhnya oleh anggaran yang telah ditetapkan setelah revisi kesepuluh, yaitu Rp 33,186,374,000.

Dengan adanya *New Normal*, kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat terlaksana pada Triwulan IV (Oktober-Desember) yaitu:

#### **1. Kegiatan Pengawasan, Pembinaan, dan Pengawalan selama Triwulan IV Tahun 2021**

##### a. Inspektorat I:

- ✓ Reviu usulan DIPA TA 2021 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- ✓ Reviu Perencanaan Program dan Anggaran TA 2021 pada BPSDMI;
- ✓ Audit bantuan masker pada BPSDMI;
- ✓ Reviu Revisi DIPA TA 2021 pada Sekretariat Jenderal ;
- ✓ Pengawasan Triwulan III Kegiatan Berisiko (Konstruksi, Mesin/Peralatan, Diklat 3 in 1, Pengadaan Tanah dan Jasa Konsultansi) pada Politeknik APP Jakarta, Politeknik STMI Jakarta dan BPSDMI;
- ✓ Melakukan Reviu Perencanaan Program dan Anggaran TA 2021 pada BPSDMI sesuai dengan Surat Tugas No. 1131/IJ-IND/ST/8/2021;
- ✓ Buka Blokir Anggaran Tahun 2021 pada Biro Umum;
- ✓ Reviu Pergeseran Anggaran pada BPSDMI Jakarta;
- ✓ Reviu Usulan Revisi DIPA TA 2021 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- ✓ Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada BPSDMI;
- ✓ Pembinaan dan pengawasan pada BPSDMI;
- ✓ Studi Banding Sistem Informasi di Politeknik STTT Bandung;
- ✓ Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung PID1 4.0 di Permata Hijau;
- ✓ Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung Politeknik APP Jakarta;

- ✓ Pendampingan pelaksanaan penilaian eksternal WBK/WBBM pada SMK/SMTI Yogyakarta dan BDI Yogyakarta.
- ✓ Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung Politeknik APP Jakarta;
- ✓ Uji Fisik Audit Pekerjaan Pengurungan dan Pembangunan Pagar Politeknik IFPK Kendal;
- ✓ Uji Fisik Audit BPSDMI TA 2021 pada Politeknik STTT Bandung (Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan TA 2018 dan Sampling Kinerja PPKVI);
- ✓ Uji Fisik Audit BPSDMI TA 2021 pada Politeknik ATK dan BDI Yogyakarta;
- ✓ Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung AKOM Solo;
- ✓ Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Pagar Politeknik Cilegon;
- ✓ Mengkoordinir Tim Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Pagar Politeknik Cilegon;
- ✓ Tindak Lanjut Sistem Informasi di Sekolah Politeknik STTT Bandung;
- ✓ Koordinasi Hasil Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada BPSDMI;
- ✓ Pembinaan Pengawasan pada BPSDMI;
- ✓ Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2021;
- ✓ Uji Fisik Audit Pekerjaan Pengurungan dan Pembangunan Pagar Politeknik IFPK Kendal;
- ✓ Uji Fisik Audit BPSDMI TA 2021 pada BPSDMI, Politeknik STMI Jakarta;

**b. Inspektorat II:**

- ✓ Melakukan Review Finalisasi Program Kegiatan dan Anggaran Ditjen IKMA TA 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021, berdasarkan Surat Tugas 1441/IJ-IND/ST/X/2021;

- ✓ Melakukan Review RKAKL Pagu Anggaran Ditjen ILMATE TA 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021, berdasarkan Surat Tugas 1469/IJ-IND/ST/X/2021;
- ✓ Melakukan Penelaahan RKBMN Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal ILMATE, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021, berdasarkan Surat Tugas 1467/IJ-IND/ST/X/2021;
- ✓ Melakukan Penelaahan RKBMN Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal IKMA, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021, berdasarkan Surat Tugas 1468/IJ-IND/ST/X/2021;
- ✓ Melakukan Review RKAKL Revisi Pagu Anggaran Ditjen ILMATE TA 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021, berdasarkan Surat Tugas 1495/IJ-IND/ST/X/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik dalam rangka Audit Tematik Ditjen IKMA TA 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2021, berdasarkan Surat Tugas 1408/IJ-IND/ST/10/2021
- ✓ Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit Dana Dekonsentrasi Kalimantan Utara TA 2018 terhitung mulai tanggal 3 November 2021 s.d. tanggal 5 November 2021, berdasarkan ST 1529/IJ-IND/ST/XI/2021,
- ✓ Pelaksanaan Kegiatan Audit BMDTP pada sektor Ditjen ILMATE terhitung mulai tanggal 10 November 2021 s.d. tanggal 17 Desember 2021, berdasarkan ST 1546/IJ-IND/ST/XI/2021
- ✓ Audit BMDTP di PT Hartono Istana Teknologi Kudus, (15 s.d. 18 November 2021), berdasarkan ST 1598/IJ-IND/ST/11/2021;
- ✓ Audit BMDTP di PT Topy Palingda Manufacturing Indonesia Karawang, 3 hari kerja (18 s.d. 20 November 2021), berdasarkan ST 1603/IJ-IND/ST/11/2021
- ✓ Audit BMDTP di PT Altinex Bandung, (18 s.d. 20 November 2021), berdasarkan ST 1608/IJ-IND/ST/11/2021;
- ✓ Audit BMDTP di PT Garuda Metalindo Bekasi, (18 s.d. 20 November 2021), berdasarkan ST 1605/IJ-IND/ST/11/2021;

- ✓ Audit BMDTP di PT Sugiura Indonesia Karawang, (18 s.d. 20 November 2021), berdasarkan ST 1606/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Dharma Polimetal Bekasi, (18 s.d. 20 November 2021), berdasarkan ST 1607/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Terang Dunia Internusa Bogor, (18 s.d. 20 November 2021), berdasarkan ST 1604/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Pura Barutama Kudus, (16 s.d. 18 November 2021), berdasarkan ST 1599/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Sakai Indonesia Bekasi, (15 s.d. 17 November 2021), berdasarkan ST 1602/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Hi-Lex Indonesia Bekasi, (15 s.d. 17 November 2021), berdasarkan ST 1601/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Aisin Indonesia Bekasi, (15 s.d. 17 November 2021), berdasarkan ST 1600/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Matsuo Precision Bekasi, (25 s.d. 27 November 2021), berdasarkan ST 1612/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Mitsuba Indonesia Tangerang, (22 s.d. 24 November 2021), berdasarkan ST 1611/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Communication Cable System Cilegon, (22 s.d. 24 November 2021), berdasarkan ST 1610/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Audit BMDTP di PT Menara Terus Makmur Bekasi, (25 s.d. 27 November 2021), berdasarkan ST 1613/IJ-IND/ST/11/2021,
- ✓ Konsultasi Peningkatan Kapabilitas APIP dengan BPKP;
- ✓ Melakukan Pendampingan Persiapan Zona Integritas Menuju WBBM pada Satuan Kerja BPIPI Sidoarjo;
- ✓ Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan dana Dekonsentrasi Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi D.I Yogyakarta;

- ✓ Forum Group Discussion Evaluasi Capaian Rencana Aksi Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Tahun 2021;
- ✓ Koordinasi Pelaksanaan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Koordinasi Program Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022;
- ✓ Permintaan Keterangan Ahli atas Hasil Uji Masker Kain di Balai Besar Tekstil Bandung;

**c. Inspektorat III:**

- ✓ Audit program dan kegiatan tahun anggaran 2020 pada BSI dan BBKK Jakarta;
- ✓ Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan beresiko tinggi pada BSI dan BBKK;
- ✓ Pengawasan dan revidu atas koreksi nilai asset Gedung dan bangunan pada Baristand Industri Medan;
- ✓ Pendampingan Inspektur Jenderal dalam pelaksanaan Zona Integritas pada Satker Baristand Industri Medan;
- ✓ Revidu RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 pada Satker BSKJI, Inspektorat Jenderal dan Pusdatin;
- ✓ Revidu revisi anggaran TA 2022 pada Satker BSKJI, Inspektorat Jenderal dan Pusdatin;
- ✓ Revidu RKBMN TA 2023 pada Satker BSKJI, Inspektorat Jenderal dan Pusdatin
- ✓ Koordinasi analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan pada SMK-SMTI, Baristand Aceh dan Disperindag Aceh;
- ✓ Pengawasan program/kegiatan beresiko tinggi pada satker Baristand Industri Medan;

- ✓ Pengawasan program/kegiatan beresiko tinggi pada satker Baristand Industri Surabaya;
- ✓ Melaksanakan koordinasi terkait penyelenggaraan Temu Teknis Pelanggan BSI;
- ✓ Peserta Forum Rapat Koordinasi Pengawasan di Bali.
- ✓ Audit Pengadaan Bantuan 200.000 Masker di Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Banda Aceh;
- ✓ Pengawasan Program dan Kegiatan Beresiko Tinggi TA 2021 Pada Satker Baristand Industri Ambon;
- ✓ Melaksanakan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Kewajaran Harga Masker Pada PT Nirwana Alabare Garmen;
- ✓ Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas.

**d. Inspektorat IV:**

- ✓ Survey lapangan perusahaan peserta Hannover Messe;
- ✓ Pengawasan Kegiatan Indonesia Halal Industry Award 2021 Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
- ✓ Pendampingan Penilaian BMN PMPP Ditjen Industri Agro di PT Perkebunan Nusantara XI;
- ✓ Audit Kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional TA 2020;
- ✓ Reviu revisi anggaran terkait RCID dan road to G20;
- ✓ Koordinasi Pembahasan Persiapan Pengajuan Permohonan Persetujuan Sewa BMN di Lingkungan Ditjen Industri Agro;
- ✓ Audit Pengadaan Masker Kain Dalam Rangka Penanganan Darurat Covid-19 Ditjen KPAIL;
- ✓ Reviu Usulan RKA-K/L Ditjen IKAFT Berdasarkan Pagu Alokasi TA 2022;
- ✓ Reviu Usulan RKA K/L TA 2022 Ditjen Industri Agro;
- ✓ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara kementerian Perindustrian TA 2023;
- ✓ Reviu RKA-K/L PPIH TA 2022;

- ✓ Pengawasan Kegiatan Indonesia Halal Industry Award 2021 Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
- ✓ Reviu Usulan RKAKL Pusat Tahun 2022 Pusat P3DN , KPAIL, & PPIH;
- ✓ Audit Kinerja Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri TA 2020;
- ✓ Reviu Usulan Revisi DIPA dalam rangka Realokasi Anggaran PEN 2021 Ditjen IKFT;
- ✓ Reviu Revisi Anggaran TA 2021 Pusat P3DN.
- ✓ Pendampingan penilaian BMN PMPP Ditjen Industri Agro di PT Perkebunan Nusantara IX;
- ✓ Pengawasan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan produk Fitofarmaka pada sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Tahun Anggaran 2021;
- ✓ Dialog dan kunjungan kerja Optimalisasi Peningkatan Daya Saing Industri Keramik dan Kaca;
- ✓ Pengawasan Kegiatan Verifikasi Kebutuhan Komoditas Perikanan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong bagi Industri Tahun 2021 Ditjen Industri Agro;
- ✓ Pengujian Lapangan Perusahaan Penerima Fasilitas Sertifikasi TKDN dalam rangka Audit Pusat P3DN;
- ✓ Pengawasan kegiatan verifikasi kebutuhan bahan baku jagung untuk Industri Makanan dalam rangka perbaikan Alur Alir material bahan baku Industri Ditjen Industri Agro;
- ✓ Pengawasan pemetaan kebutuhan garam industri selain dari impor;
- ✓ Pengawasan Evaluasi P3DN dan Integrasi Data pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga;
- ✓ Pengawasan kegiatan The 2nd Regional Conference on Industrial Development Ditjen KPAIL;
- ✓ Sampling audit BMDTP sektor Industri Agro dan IKFT
- ✓ Pengujian lapangan perusahaan penerima fasilitas sertifikasi TKDN dalam rangka Audit Pusat P3DN.
- ✓ Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan PPIH Tahun 2021.

## **2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan**

Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring capaian kinerja Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester II Tahun 2021 melalui aplikasi SMART DJA, dan E-Monev Bappenas.
- 2) Penyelesaian laporan evaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal rutin setiap bulan
- 3) Koordinasi fasilitasi Forum Rapat Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan di Hotel Merusaka Bali yang dilaksanakan secara *Hybrid*. Kegiatan yang dilakukan yaitu forum diskusi terkait pengawasan yang akan dilaksanakan di Tahun 2022, penandatanganan “Bali Commitment” oleh Eselon I Kementerian Perindustrian, peluncuran Sistem Informasi Pengawasan (Si-Nga).
- 4) Revisi Renstra Inspektorat Jenderal dan Eselon II dibawahnya;
- 5) Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dan Eselon II dibawahnya;
- 6) Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2022;
- 7) Evaluasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021;
- 8) Persiapan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- 9) Pengisian Renstra pada aplikasi Intranew untuk mendukung SKP Pegawai.

## **3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Hukum, dan Organisasi**

Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama Triwulan IV (Oktober-Desember 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Finalisasi Pemutakhiran Data Mandiri SAPK Badan Kepegawaian Negara (100% terpenuhi);
- b. Koordinasi terkait peserta Konferensi IIA;
- c. Sosialisasi PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
- d. Koordinasi dan Rapat Penilaian Angka Kredit Semester I Tahun 2021;

- e. Revisi SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Gol IV/b-IV/e dan SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sampai dengan Gol IV/a;
- f. Finalisasi Pedoman Audit Kinerja;
- g. Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat dan Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi Pegawai itjen;
- h. Sosialisasi BPJS Kesehatan;
- i. Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Lepas/Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022;
- j. Sosialisasi TASPEN Smart dari Biro OSDM;
- k. Revisi SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk JFA sampai dengan gol IV/a dan SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk JFA gol IV/a sampai dengan IV/d;

#### **4. Pengelolaan Keuangan**

Kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan selama Triwulan IV (Oktober-Desember 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan;
- b. Pelaporan capaian output ke KPPN;
- c. Koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan;
- d. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- e. Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait Sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN;
- f. Penyusunan Laporan Perbendaharaan rutin tiap bulan;
- g. Penyusunan Laporan Barang dan Jasa Semester II Tahun 2021.

Indikator Capaian Kinerja yang menjadi tanggungjawab pada bagian keuangan adalah capaian Nilai Pelaporan Keuangan (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2021 yang dilihat dari gaji dan tunjangan sebesar memperoleh nilai 75,71.

## 5. Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dilaksanakan selama Triwulan IV (Oktober-Desember 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dengan progress Menindaklanjuti Sosialisasi ttg SHPRBZI yang disampaikan oleh Menpan kepada 31 satker yang diusulkan WBK/WBBM. Dijelaskan mengenai penggunaan aplikasi aplikasi/website SHPRBZI dan kewajiban bagi satker dalam mengisi data responden dan surat-surat yang harus dilengkapi oleh satker;
- b. Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dengan progress Pengisian data Responden oleh Admin satker sudah dilaksanakan dan tinggal memantau pengisian survei oleh responden;
- c. Rapat Persiapan Desk Evaluasi Pembangunan ZI dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan 31 satker yang diusulkan WBK/WBBM dalam menghadapi Desk Evaluasi oleh Menpan. Dalam rapat dijelaskan tentang mekanisme pelaksanaan desk evaluasi dan ketentuan yang diberikan oleh Menpan;
- d. Desk Evaluasi Pembangunan ZI oleh Menpan. Evaluasi dilaksanakan kepada 31 satker dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Menpan;
- e. Pendampingan Penilaian Kementerian PAN dan RB terkait Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021. Sementara Sebanyak 12 satker telah di kunjungi pada bulan November dan 2 satker telah di jadwalkan dikunjungi pada awal desember dari total 31 satker yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM Tahun 2021. Satuan Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK ialah Balai Besar Industri Agro, Balai Diklat Industri Denpasar, Balai Besar Logam dan Mesin, Balai Diklat Industri Jakarta, Baristand Industri Palembang dan Balai Diklat Industri Yogyakarta. Satuan Kerja yang diusulkan mendapat predikat WBBM ialah BPIPI Sidoarjo, Balai Besar Kimia dan

Kemasan, BBIHP Makasar, Baristand Industri Samarinda, SMK-SMTI Yogyakarta, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Pontianak dan SMK-SMTI Pontianak;

- f. Mengikuti Rapat Pembahasan *Area of Improvement* (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal;
- g. Penyusunan konsep Kebijakan Pengawasan Intern Kemenperin Tahun 2022, Keputusan Menteri Jakwas (Kepmen Nomor 1847 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022) sudah di tanda tangani oleh Menteri Perindustrian;
- h. Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PMPZI Tahun 2021 ke Menteri Perindustrian. Laporan disampaikan berupa Nota Dinas Inspektur Jenderal nomor 476 /IJ-IND/PW/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 yang menjelaskan progres PMPZI sampai bulan November.

Adapun progres capaian dari Renstra Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Progres Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal pada TW IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.4%	BPK telah Me-release hasil pemeriksaan sbg berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2020: Rp 1,975,729,108,365</li> <li>✓ Temuan BPK: Rp 653,625,627.60</li> <li>✓ maka, batas toleransi temuan= temuan BPK /realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2020 jadi, batas toleransi temuan material: 0.033%</li> </ul>	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Hingga 31 Desember 2021, jumlah total rekomendasi yaitu 960, dan hingga saat ini belum ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. (0)	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Berdasarkan Laporan Klinik, Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2021, Jumlah Pengaduan yang diterima sebanyak 319 kali pengaduan, diantaranya 1 kali berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti baik yang tidak berkadar pengawasan maupun yang berkadar pengawasan <b>(100%)</b> .	
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	91.5%	Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020. Dari total rekomendasi 673 data, data yang ditindaklanjuti sebanyak 631. Sesuai rekomendasi 521 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak. Capaian rekomendasi sebesar $631/673 \times 100\% = 93,76$	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hasil PMPRB pada tanggal 17 Juni 2021 telah diperoleh, indikator kinerja telah tercapai.</li> <li>✓ Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB</li> <li>✓ <math>(5.61/6.25) \times 100\% = 89.76\%</math></li> </ul>	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2020-2021 Nomor B/738/SJ-IND/KU/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Diperoleh hasil bahwa nilai MRI Kementerian Perindustrian sebesar 2,620. Penilaian maturitas SPIP tahun 2021 tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian.	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden(auditi), diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 87,5% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, kapabilitas APIP Kemenperin telah mencapai Level 3 dengan catatan	
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	86% berdasarkan perhitungan Kepala Sub Bagian TU masing-masing Inspektorat	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	Perbandingan Pagu dan realisasi Inspektorat Jenderal $6,465,799,041/6,842,884,000*100%=94,49\%$	
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1. Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Terdapat 4 Peraturan bidang industri yang menjadi pedoman di Inspektorat Jenderal. Namun Hanya 3 peraturan yang diterapkan. Sehingga capaian efektivitas regulasi yang diterapkan mencapai <b>75%</b> . Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implemmtasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kebijakan Teknis	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
				Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2021; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.	
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	Hasil Penilaian SAKIP Eselon I Tahun 2020 yang telah dilaksanakan, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai <b>80,1</b>	
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan setiap Inspektorat pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Seluruh kegiatan pengawasan yang meliputi audit, pengawalan, reviu dan kegiatan Non PKPT lainnya (sesuai arahan pimpinan) seluruhnya dapat terlaksana. Sehingga capaian untuk indikator ini mencapai <b>100%</b>	
		2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai <b>100%</b>	
		3. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	Capaian Indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dijalankan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Sebanyak <b>75%</b> responden yang mengikuti penilaian, merasakan puas akan pelayanan dukungan manajemen yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal	
		4. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen telah mencapai target, yaitu 91% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,02/36,3 = 0,91 * 100\% = 91\%$	
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74%	Nilai Pelaporan Keuangan yang diperoleh dan dapat dilihat di Aplikasi Smart DJA periode Januari-Desember 2021 yang memuat gaji dan tunjangan, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai <b>75,71</b>	
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. Rata-rata Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Jumlah Total nilai pegawai 1832 dibagi jumlah pegawai 24 = <b>76,33</b>	
		2. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	PKS yang telah dilaksanakan adalah 7 Pelatihan (Januari-September), diklat substansi yg telah dikutsertakan 11. Maka Capaian hingga September 2021: $7/11 * 100\% = 64\%$ 7 PKS, yaitu Penilaian Mandiri SPIP/MRI, PKS penilaian SAKIP tahun 2020, PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP, PKS Overview Manajemen Resiko Indeks, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18,	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
				CRMO bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
		3. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Hingga Desember 2021, Jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sebanyak 81 orang dibagi dengan jumlah keseluruhan pegawai Itjen 104 orang dikali 100% = <b>77.88%</b> .	

**Keterangan :**



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak Tercapai

### **III.3. Hambatan dan Kendala**

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan IV seluruhnya telah berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun masih ditemukan kegiatan MRI yang belum dapat tercapai target yang dilaksanakan di tahun 2021, Namun Penilaian MRI tahun 2021 tidak dilakukan per unit kerja, tetapi dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian. Adapun hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Adanya aturan baru dalam menilai Maturitas SPIP, menjadikan unsur-unsur yang dinilai berbeda dengan peraturan sebelumnya, selain itu batas waktu penilaian yang diberikan terlalu singkat sehingga capaian Indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) tidak tercapai;

### **III.4. Langkah Tindak Lanjut**

Upaya dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dapat dilaksanakan lebih awal di tahun 2022 agar penyelesaian tidak terburu waktu.

## **BAB IV PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2021 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 (Januari-Desember) mencapai Rp 32,997,358,394, - atau 99.43 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,186,374,000,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran masih ada yang belum dapat dicapai karena kurangnya manajemen waktu dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut.

Untuk selanjutnya perlu koordinasi internal maupun eksternal untuk menjamin realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan target.

Informasi capaian kinerja Triwulan IV ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal TA 2022 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

# LAMPIRAN

## Kegiatan Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
<b>1. S1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>													
	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,4 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	100 Persen
	Pagu = Rp. 7.073.312.000												
	S1.2 - Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	90 Persen
	Pagu = Rp. 219.598.000												
	S1.3 - Pengaduan masyarakat berkedar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	39%	0,1 Persen
	Pagu = Rp. 335.712.000												
	S1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91,5 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	62 Persen
	Pagu = Rp. 8.754.599.000												
	<b>Total Pagu = Rp. 16.383.221.000</b>												
<b>2. S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>													
	S2.1 - Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	97%	100 Persen
	Pagu = Rp. 264.164.000												
	S2.2 - Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	78%	1 Level
	Pagu = Rp. 115.490.000												
	<b>Total Pagu = Rp. 379.654.000</b>												
<b>3. S3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>													
	S3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	60%	0 Persen
	Pagu = Rp. 1.202.560.000												
	S3.2 - Capaian IACM Itjen	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%	97%	0 Level
	Pagu = Rp. 1.004.236.000												
	S3.3 - Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0 Persen
	Pagu = Rp. 644.437.000												
	<b>Total Pagu = Rp. 2.851.233.000</b>												
<b>4. S4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien</b>													
	S4.1 - Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	101%	75 Persen
	Pagu = Rp. 38.160.000												
	S4.2 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	85 Persen
	Pagu = Rp. 4.400.000												
	S4.4 - Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	0 Persen
	Pagu = Rp. 11.036.000												
	S4.3 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	77%	0 Persen
	Pagu = Rp. 1.525.694.000												
	S4.5 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	59%	0 Persen
	Pagu = Rp. 31.648.000												
	S4.6 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	25%	0 Persen
	Pagu = Rp. 16.050.000												
	<b>Total Pagu = Rp. 1.626.988.000</b>												
<b>5. S5 - Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas</b>													
	S5.1 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0 Persen
	Pagu = Rp. 72.200.000												